



## Entrepreneurship Bisnis Manajemen Akuntansi (E-BISMA)

Journal homepage: [ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/j-mae](http://ejournal.widyamataaram.ac.id/index.php/j-mae)



### Efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat

<sup>1\*</sup>Luthfi Ridhatul Ikhsan, <sup>2</sup>Wahyu Budi Priatna, dan <sup>3</sup>Burhanuddin

<sup>1,2,3</sup>Program Studi Sains Agribisnis, Fakultas Ekonomi dan Manajemen, IPB University, Jl. Kamper Wing 4 Level 5, Dramaga, Bogor, Indonesia

\*e-mail korespondensi: [luthfridhatul@apps.ipb.ac.id](mailto:luthfridhatul@apps.ipb.ac.id)

Article Info	Abstract
<p><b>Keywords:</b>                      BUMDes effectiveness; villager welfare; BUMDes effectiveness indicators</p>	<p><i>Development that starts in the village sector is the first step to run the economy of Indonesia, one of the many development programmes are the formation of the Village-Owned Enterprise (BUMDes). The presence of BUMDes is expected to be able to improve the standard of living and community welfare. Community welfare itself has a meaning that has been stated in Indonesian Law (UU No. 11 of 2009). The objectives of this study are to analyze the effectiveness of Village-Owned Enterprises that have managed their business units, to analyze the welfare of village communities affected by the operation of Village-Owned Enterprises and to analyze the influence that occurs between the effectiveness of Village-Owned Enterprises and the welfare of village communities. Descriptive analysis, paired sample T-Test, correlation and ordinal regression analysis are among those of the methods that are used in this study. The result of the study shows that there is a positive and significant correlation between the effectivity of the BUMDes and the welfare of the villagers, and there are 4 indicators of effectiveness of the BUMDes that significantly impactful to the welfare of the villagers, and it consist of sustainability, impact, empowerment, and participation.</i></p>

Info Artikel	Abstrak
<p><b>Kata Kunci:</b>                      Efektivitas BUMDes; kesejahteraan masyarakat; indikator efektivitas BUMDes</p>	<p>Pembangunan yang dilaksanakan pada sektor desa merupakan langkah awal untuk memutar roda perekonomian di Indonesia, salah satu program pembangunan desa adalah dengan dibentuknya Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Hadirnya BUMDes diharapkan mampu untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat sendiri memiliki arti yang telah tertuang di dalam UU No. 11 Tahun 2009. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis efektivitas dari Badan Usaha Milik Desa yang telah mengelola unit usahanya., menganalisis kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak dari beroperasinya Badan Usaha Milik Desa dan menganalisis pengaruh yang terjadi antara efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan kesejahteraan masyarakat desa. Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif, uji beda T-Test, korelasi dan analisis regresi ordinal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa terdapat korelasi yang positif dan signifikan antara efektivitas BUMDes dengan kesejahteraan masyarakat serta terdapat 4 indikator efektivitas BUMDes yang berpengaruh secara signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat yaitu indikator <i>sustainability, impact, empowerment dan participation</i>.</p>



## 1. PENDAHULUAN

Pembangunan di sektor desa adalah langkah awal untuk memulai roda perekonomian di Indonesia. Salah satu program pembangunan desa adalah pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). BUMDes adalah lembaga di tingkat desa yang bertujuan mengelola kekayaan asli desa dan mengoptimalkan dana pembangunan. Menurut UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa, BUMDes adalah badan usaha atau lembaga yang mayoritas atau seluruh kepemilikannya dipegang oleh desa untuk mengelola aset, layanan, dan usaha lainnya demi kesejahteraan masyarakat desa (Maskudi et al., 2022).

Pada tahun 2010, Peraturan Perundang-undangan (2020) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 mendorong keberadaan BUMDes sebagai salah satu pusat ekspansi ekonomi yang transparan dan bertanggung jawab. Namun, pengembangan program ekonomi produktif melalui BUMDes masih sulit diwujudkan oleh masyarakat desa. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan perubahan yang berhubungan dengan pengembangan kesejahteraan masyarakat desa sesuai dengan amanat UUD 1945.

Program pembangunan pedesaan fokus pada pengentasan kemiskinan, peningkatan mata pencaharian, dan pengembangan infrastruktur melalui program-program inovatif. Indonesia, sebagai respons terhadap permasalahan pembangunan desa, membentuk BUMDes sebagai lembaga ekonomi di desa. BUMDes diharapkan dapat mendorong perkembangan ekonomi, kreativitas, inovasi, dan pendapatan masyarakat desa, serta meningkatkan usaha mikro sektor informal di pedesaan dan pendapatan asli desa (Khumayah, 2021).

Hadirnya BUMDes dapat memberikan transformasi signifikan dalam aspek ekonomi dan sosial. Peningkatan Pendapatan Asli Desa (PADes) melalui BUMDes berdampak pada hubungan sosial antarwarga. Namun, pendapatan yang dihasilkan oleh BUMDes belum sepenuhnya dinikmati oleh masyarakat desa. Untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, BUMDes perlu diberikan legitimasi yang tepat agar mampu meningkatkan PADes dan pengembangan ekonomi desa secara menyeluruh (Sofyan et al., 2022).

Hadirnya BUMDes diharapkan dapat menjadi salah satu pilar kemandirian ekonomi desa. Namun, perjalanan BUMDes menghadapi berbagai permasalahan, termasuk masalah internal. Banyak BUMDes yang mengalami kegagalan atau hanya berfungsi sebagai nama saja sebelum mengalami perkembangan. BUMDes diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa, mengurangi pengangguran, serta melibatkan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes (Faedlulloh, 2018).

Pengertian kesejahteraan masyarakat sesuai dengan UU No. 11 Tahun 2009 merupakan keadaan di mana kebutuhan material, intelektual, dan sosial warga negara terpenuhi untuk mencapai kehidupan yang layak. Upaya untuk menciptakan kesejahteraan tidak terlepas dari pengentasan kemiskinan. Pemberian kesejahteraan sosial adalah salah satu upaya untuk menciptakan negara dengan tingkat kesejahteraan yang tinggi agar masyarakat dapat hidup sesuai dengan martabat kemanusiaan.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk menilai kualitas hidup masyarakat melalui pendidikan, kesehatan, dan tingkat pendapatan. IPM digunakan sebagai indikator keberhasilan pembangunan dan penentuan alokasi dana oleh pemerintah.

Indonesia harus memperhatikan tiga dimensi pembentuk IPM (umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup yang layak) untuk mencapai pembangunan manusia yang baik. Salah satu upaya untuk meningkatkan IPM adalah melalui pendidikan formal (Ndakularak et al., 2017; Teja, 2015).

Kabupaten Gunungkidul, sebagai kabupaten penyangga di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, memiliki kekayaan alam yang melimpah. Kabupaten Gunungkidul memberikan kontribusi pada perekonomian Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta melalui sektor pariwisata dan pengelolaan potensi alam. Namun, IPM di Kabupaten Gunungkidul tergolong rendah. BUMDes di Gunungkidul banyak mengelola unit usaha pengelolaan kawasan wisata, terutama dengan pendekatan agribisnis. BUMDes tersebut melibatkan masyarakat desa dalam pengelolaan wisata, seperti karang taruna, kelompok sadar wisata, petani, peternak dan pembudidaya ikan air tawar (Pemkab Gunungkidul, 2022).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas BUMDes dalam mengelola unit usahanya melalui pendekatan *effectivity, relevance, sustainability, impact, empowerment, dan participation* yang dikemukakan oleh (Dale, 2004). Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesejahteraan masyarakat desa yang terdampak oleh operasional BUMDes melalui pendekatan indeks pembangunan manusia (IPM) yang meliputi pendapatan, pengeluaran, kesehatan rumah tangga, akses fasilitas kesehatan, kualitas pendidikan, dan akses Pendidikan (BPS, 2022; BPS Kabupaten Gunungkidul, 2021). Penelitian ini juga menganalisis hubungan antara efektivitas BUMDes dan kesejahteraan masyarakat desa. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait penilaian efektivitas BUMDes terhadap kesejahteraan masyarakat desa dan berkontribusi dalam pengembangan BUMDes untuk mendorong kesejahteraan masyarakat.

## 2. KAJIAN TEORI DAN HIPOTESIS

### Badan Usaha Milik Desa

Baru-baru ini terjadi peningkatan diskusi mengenai perubahan yang berlangsung dalam pembangunan pedesaan, baik dari segi sifat perubahan yang sedang berlangsung dalam aspek ekonomi pedesaan dan dalam hal pendekatan yang diadopsi terhadap suatu kebijakan mengenai pedesaan. Program pembangunan pedesaan berfokus pada tingkat kemiskinan, peluang untuk mendapatkan mata pencaharian yang lebih baik, ketentuan dasar dari sarana dan prasarana melalui program-program inovatif dengan berdasarkan upah dan pekerjaan mandiri (Aliyani & Mafruhah, 2022).

Indonesia dalam menjawab permasalahan pembangunan desa, membentuk satu lembaga ekonomi di desa yang dikenal sebagai BUMDes. Tujuan dari dibentuknya BUMDes adalah untuk mendorong perkembangan dari aspek ekonomi masyarakat desa, meningkatkan kreativitas dan inovasi serta peluang usaha ekonomi yang lebih produktif untuk masyarakat desa, mendorong tumbuh dan berkembangnya usaha mikro sektor informal di wilayah pedesaan, meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat yang berada di desa serta meningkatkan pendapatan asli desa (Supardi & Budiwitjaksono, 2021). BUMDES di Desa Karangrejek secara umum dapat dinyatakan telah berhasil dan berjalan dengan lancar karena memiliki dampak positif bagi masyarakat desa. Implikasi

penelitian ini berkaitan dengan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat terutama dalam mengembangkan kemampuan untuk berusaha, peningkatan dalam pengetahuan serta keterampilan dan sikap yang akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Temuan penelitian juga mampu menumbuhkan dan memupuk jiwa kewirausahaan bagi masyarakat desa serta menumbuhkan rasa tanggung jawab terhadap sebuah kebijakan (Paramita et al., 2021).

Desa Pongkok telah berhasil dalam mengembangkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) yang memanfaatkan serta mengelola aset dan potensi desa yaitu sumber air. Model dari pengelolaan yang dilakukan oleh BUMDes Tirta Mandiri adalah dengan cara terstruktur, transparan, dan melibatkan partisipasi dari masyarakat yang sangat tinggi. Sikap yang dicerminkan oleh masyarakat dan pemerintah desa berupa kerjasama, keterbukaan, dan ramah terhadap pendatang serta memanfaatkan teknologi secara maksimal. Pemanfaatan teknologi yang maksimal menjadi faktor penting dalam mendorong keberhasilan pengelolaan BUMDes. Selain faktor pendorong terdapat juga faktor penghambat dalam pengelolaan BUMDes. Faktor penghambat tersebut adalah persaingan dengan badan usaha jenis lain yang terdapat di desa. Faktor penghambat tersebut dapat diatasi dengan partisipasi masyarakat yang tinggi di dalam aneka unit pengelolaan usaha desa melalui BUMDes. BUMDes secara berkala terus mendorong terwujudnya masyarakat Desa Pongkok yang berdaya saing, baik secara sosial maupun secara ekonomi. Hal tersebut dimaksudkan untuk masyarakat Desa Pongkok agar memiliki tingkat kesejahteraan yang lebih. Keberhasilan Desa Pongkok dalam mengelola potensi yang dimiliki dengan menggerakkan BUMDes dapat menjadi salah satu contoh bagi desa lainnya di Indonesia yang sedang dalam tahap berkembang. Contoh yang dapat diterapkan adalah dengan menggabungkan prinsip sosial berupa partisipasi masyarakat dengan prinsip ekonomi berupa pengelolaan unit usaha desa, sebagai salah satu upaya dalam memberdayakan masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan (Subehi et al., 2018).

### **Unit Usaha Pengelolaan Kawasan Wisata**

Desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia tidaklah memiliki sifat yang sama diantara satu dengan yang lainnya, melainkan desa-desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia memiliki keanekaragaman yang berbeda dan menjadi ciri khas tersendiri dari desa itu sendiri. Desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia juga memiliki tipologi yang berbeda. Saat ini tipologi desa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia dapat dikelompokkan menjadi delapan tipologi desa yang terdiri dari kehutanan, perkebunan, persawahan, perladangan, pesisir, peternakan, industri atau jasa, dan pertambangan (Zulpikar, 2020).

Kebijakan terkait dengan pengembangan ekonomi pedesaan merupakan salah satu upaya dalam menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan berkembangnya beberapa kegiatan ekonomi produktif dan kewirausahaan di desa serta memiliki tujuan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat desa. Saat ini, pada umumnya ekonomi pedesaan sangat identik dengan sektor pertanian, maka dari itu perlu adanya kebijakan yang dapat mengatur mengenai pengembangan dari jiwa kewirausahaan di sektor pertanian, dan hal tersebut hingga sampai saat ini masih dipergunakan oleh negara-negara

lain di dunia. Melalui pengembangan dari jiwa kewirausahaan di sektor pertanian ataupun melalui produksi pangan menyebabkan pembangunan desa dapat berjalan sesuai dengan rencana pemerintah terkait dengan penanggulangan kemiskinan dan penanggulangan arus urbanisasi ke perkotaan dari masyarakat desa untuk mencari penghidupan yang layak (Nasfi, 2020).

Saat ini penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan merupakan kolaborasi yang cukup efektif untuk memanfaatkan sumber daya yang ada. Kolaborasi tersebut terjadi antara masyarakat dan pemerintah. Peran pemerintah dalam penguatan pembangunan ekonomi daerah yang berkelanjutan adalah sebagai regulator dalam mengupayakan partisipasi masyarakat lokal secara penuh dalam setiap kegiatan ekonomi. Upaya yang optimal dari pemanfaatan sumber daya lokal yaitu dengan mengembangkan pariwisata dengan konsep ekowisata. Wisata yang dilakukan erat kaitannya dengan berbagai upaya dalam hal konservasi, pemberdayaan ekonomi lokal, dan dorongan untuk lebih menghargai perbedaan kultur atau budaya. Pergeseran dari konsep pariwisata dunia menuju konsep model ekowisata disebabkan oleh terjadinya kejenuhan yang dialami oleh wisatawan dalam mengunjungi objek wisata yang diciptakan dengan sengaja atau objek wisata buatan. Pergeseran dari konsep pariwisata ini menjadi sebuah peluang yang seharusnya dapat dimanfaatkan secara maksimal dalam menarik wisatawan domestik maupun wisatawan mancanegara untuk mengunjungi objek wisata yang berbasis kepada alam dan budaya dari penduduk local (Sukarnoto, 2020).

### **Kesejahteraan Masyarakat**

Dari istilah tersebut dan mendefinisikannya sebagai layanan yang disediakan secara sosial untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup individu atau masyarakat secara keseluruhan (Jung, 2009; Lee, 2010). Layanan sosial yang digunakan oleh tiga negara tersebut yaitu Inggris, Korea, dan Amerika diimplementasikan untuk mendukung kesejahteraan sosial di ketiga negara tersebut (Nurdin, 2023). Kesejahteraan dapat diartikan sebagai sebuah kondisi dimana seseorang dapat memenuhi kebutuhan pokok dari hidupnya, baik itu kebutuhan akan makanan, pakaian, tempat tinggal, air minum yang bersih serta kesempatan untuk melanjutkan pendidikan baik secara formal maupun informal dan memiliki pekerjaan yang memadai untuk menunjang kualitas hidupnya sehingga hidupnya bebas dari kemiskinan, kebodohan, ketakutan, atau kekhawatiran sehingga hidupnya aman tentram, baik lahir maupun batin (Hasimi, 2020).

Kesejahteraan juga dapat diartikan sebagai salah satu aspek yang cukup penting untuk menjaga dan membina terjadinya stabilitas sosial dan ekonomi. Kondisi tersebut, diperlukan untuk meminimalkan terjadinya kecemburuan sosial dalam masyarakat. Selanjutnya percepatan dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat memerlukan kebijakan ekonomi atau peranan pemerintah dalam mengatur perekonomian sebagai upaya menjaga stabilitas perekonomian (Windusancono, 2021).

Indeks Pembangunan Manusia atau IPM merupakan salah satu cara untuk mengukur taraf kualitas hidup dari masyarakat. Kualitas hidup tercermin dari pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat yang dilihat dari tingkat pendapatan. Semakin tinggi tingkat pendidikan masyarakat akan memudahkan untuk mendapatkan pekerjaan yang lebih

baik serta memperoleh pendapatan sehingga masyarakat mudah mengakses kesehatan. Kesehatan masyarakat yang rendah menyebabkan produktivitas rendah, produktivitas rendah akan menyebabkan rendahnya pendapatan masyarakat. Pendapatan yang rendah menyebabkan masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dan kesehatan karena keterbatasan biaya. Jika hal ini terjadi maka akan berdampak pada rendahnya kualitas pembangunan manusia atau yang disebut dengan IPM (Ndakularak et al., 2017). Upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia guna memperbaiki IPM melalui jalur pendidikan formal antara lain: pemenuhan kebutuhan fasilitas pendidikan prasekolah, pendidikan dasar 9 tahun, pendidikan menengah atas, kejuruan menengah, pendidikan tinggi, dan kursus-kursus keprofesionalan sesuai dengan kebutuhan kerja yang semakin berkembang (Teja, 2015).

### **Efektivitas Badan Usaha Milik Desa dengan Kesejahteraan Masyarakat**

Penetapan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membawa dampak positif terutama pada perubahan orientasi yang dilakukan oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pemerintahan desanya dengan memberikan kewenangan yang lebih luas terhadap otonomi desa. Selain dari pemberian wewenang untuk mengurus otonomi desa sendiri, di dalam UU No. 6 Tahun 2014 tersebut pemerintah desa diberikan kembali kewenangan yang lebih luas lagi terkait dengan pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa. Pembangunan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat desa harus mendasar kepada optimalisasi dari potensi, peluang dan kemampuan yang dimiliki oleh desa tersebut (Septiawati et al., 2021).

UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 87 Tentang Desa, mengatur Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut dengan BUMDes dengan menjaga semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan serta mengatur BUMDes untuk menjalankan usaha di bidang ekonomi dan atau pelayanan umum sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 88 Tentang Desa mengatur Desa untuk mendirikan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes yang telah disepakati dalam musyawarah bersama dengan warga desa yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Desa atau PerDes. UU No. 6 Tahun 2014 Pasal 89 Tentang Desa mengatur terkait dengan hasil dari pemanfaatan Badan Usaha Milik Desa yang selanjutnya disebut BUMDes untuk digunakan dalam pengembangan usaha, pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa, pemberian bantuan untuk masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial, dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa atau APBDes.

Pembangunan desa perlu direncanakan dengan baik. Perencanaan yang baik dalam membangun desa tidak pernah lepas dari kemitraan. Kemitraan yang terjadi pada umumnya dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) dengan Kepala Desa, baik LPMD dan Kepala Desa harus terus menjalin kerjasama dalam proses perencanaan agar pembangunan desa yang dituju dapat dengan mudah tercapai. Kemitraan yang terjalin oleh LPMD dengan Kepala Desa dalam proses perencanaan pembangunan memiliki tujuan untuk mempromosikan pembangunan ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah pedesaan serta untuk mempromosikan kerjasama antara organisasi dalam wilayah tersebut agar dapat

mempromosikan pembangunan dan memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat desa setempat (Gurvantry et al., 2022).

Penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015) yang berjudul Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin (RTM) di Desa Babadan, Kecamatan Karangrejo, Kabupaten Tulungagung (Periode Mei 2014-April 2015) memiliki hasil yaitu penerapan dari program yang dilakukan oleh Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) di Desa Babadan sudah cukup baik. Hal tersebut dibuktikan dengan kepuasan dari masyarakat yang tergolong kategori keluarga rumah tangga miskin (RTM) terhadap penerapan dari beberapa program yang dilaksanakan oleh BUMDes selama satu tahun. Selain itu juga, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi dari kinerja BUMDes Desa Babadan yaitu BUMDes Desa Babadan telah mampu menyusun misi yang jelas dan terperinci, misi tersebut adalah mensejahterakan masyarakat Desa Babadan pada umumnya dan pada khususnya masyarakat Desa Babadan dengan kategori RTM. Mendukung dari misi yang telah dibuat secara jelas dan terperinci dengan tujuan untuk mengatasi masalah-masalah keuangan dari masyarakat, maka dari itu BUMDes Desa Babadan melaksanakan beberapa program dengan membangun unit-unit usaha seperti simpan pinjam, kredit sepeda motor, dan sektor riil dari penyewaan lahan bengkok desa. Masyarakat Desa Babadan pada akhirnya menjadikan BUMDes sebagai alternatif pertama dalam membantu untuk mengatasi permasalahan permodalan. Hal tersebut dikarenakan masyarakat Desa Babadan telah percaya dan telah membuktikan bahwa BUMDes lebih baik dari lembaga keuangan masyarakat (LKM) lainnya. Masyarakat Desa Babadan pada akhirnya memiliki harapan untuk BUMDes kedepannya agar dapat lebih baik lagi dan mampu berinovasi dengan mendirikan atau menjalankan program baru yang dapat membantu masyarakat rumah tangga miskin (RTM).

### 3. METODE PENELITIAN

Pelaksanaan penelitian ini berlokasi di Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco dan Desa Pulutan, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini ialah pendekatan kuantitatif. Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer didapatkan melalui hasil pengamatan langsung (observasi) dan kuesioner. Kuesioner tersebut ditujukan kepada responden yang terlibat dan terdampak langsung dalam program BUMDes. Data sekunder didapatkan melalui studi literatur seperti jurnal, penelitian terdahulu, dan berbagai buku yang relevan dengan penelitian ini. Data sekunder lain diperoleh dari instansi-instansi yang terkait dengan penelitian ini seperti Badan Pusat Statistik, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Gunungkidul, dan Aparatur Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco serta Desa Pulutan. Penelitian ini dalam menentukan sampel menggunakan metode *purposive sample* dengan menetapkan kriteria masyarakat Desa Nglanggeran, Desa Banyusoco serta Desa Pulutan yang terdampak dari adanya kawasan wisata dan telah berusia produktif untuk bekerja sebagai sampel dalam penelitian ini dengan jumlah sample sebanyak 105 sample. Penentuan jumlah sampel

kemudian dibantu dengan menggunakan Slovin Sample Size Formula (Mertayasa et al., 2021) yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

$n$  = Jumlah sampel

$N$  = Total populasi

$e$  = *Margin error* atau *margin of error*

Metode pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan studi pustaka, dimana studi pustaka merupakan salah satu metode pengumpulan data yang melalui studi atau penelaahan terhadap buku, literatur, dan sumber-sumber ilmiah lain yang berhubungan dengan tujuan dari penelitian. Selanjutnya metode pengumpulan data lain yang digunakan dalam penelitian ini ialah observasi, dimana observasi merupakan metode yang digunakan untuk pendahuluan dalam pengumpulan data melalui pengamatan langsung dilapangan. Metode observasi memiliki tujuan untuk memperoleh informasi dan gambaran awal mengenai kegiatan program BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan. Metode pengumpulan data yang terakhir digunakan pada penelitian ini yaitu kuesioner, dimana kuesioner merupakan metode pengumpulan data melalui komunikasi secara tidak langsung dalam bentuk pertanyaan tertulis yang disajikan melalui media tertentu. Penelitian ini menggunakan kuesioner tidak terstruktur yang memuat berbagai pertanyaan untuk diajukan kepada responden dalam bentuk terbuka. Responden diberikan kebebasan untuk menjawab dan memberikan informasi menurut pendapat dan pengalamannya. Pengisian kuesioner dilakukan secara langsung oleh peneliti guna menghindari bias jawaban dan informasi yang dipaparkan oleh responden.

Penelitian ini menggunakan metode pengolahan dan analisis data berupa analisis kuantitatif deskriptif, uji beda, korelasi *rank Pearson*, dan regresi ordinal. Bentuk persamaan dari korelasi *rank Pearson* atau *Pearson Product Moment* (Sugiyono, 2013).

$$r_{xy} = \frac{n \sum x_i y_i - (\sum x_i)(\sum y_i)}{\sqrt{\{n \sum x_i^2 - (\sum x_i)^2\} - \{n \sum y_i^2 - (\sum y_i)^2\}}}$$

Keterangan:

$r_{xy}$  = Koefisien korelasi *pearson*

$x_i$  = Variabel independen

$y_i$  = Variabel dependen

$n$  = Banyaknya sampel

Bentuk persamaan dari regresi ordinal dan menggunakan model *logit* (Hosmer & Lemeshow, 2000).

$$r_j(X) = \ln \left( \frac{P(Y \leq y_j | X)}{P(Y > y_j | X)} \right) = \alpha_j + \beta' X$$

$$r_j(X) = \ln \left( \frac{\pi_1(X) + \pi_2(X) + \dots + \pi_j(X)}{\pi_{j+1}(X) + \pi_{j+2}(X) + \dots + \pi_{j+X}(X)} \right) = \alpha_j + \beta'X, j = 1, 2, \dots, j-1$$
$$P(Y \leq j|X) = \frac{\exp(\theta_j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}{1 + \exp(\theta_j + \sum_{k=1}^p \beta_k x_k)}$$

#### 4. HASIL DAN PEMBAHASAN

##### Efektivitas BUMDes

Besaran efektivitas unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran sangat tinggi, mencapai 100 persen. Desa Nglanggeran telah berhasil mencapai status Desa Mandiri di Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Hal ini disebabkan oleh keberhasilan dalam memenuhi semua indikator efektivitas yang dinilai pada responden di Desa Nglanggeran, yang semuanya termasuk dalam kategori tinggi. Pembentukan, pengelolaan, dan pemanfaatan unit usaha ini juga telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa.

Desa Nglanggeran sebelumnya menghadapi beberapa masalah, seperti lahan yang tidak efektif, pengangguran, transmigrasi, dan penambangan ilegal. Namun, masyarakat dan karang taruna melihat masalah-masalah ini sebagai peluang dan memutuskan untuk mengembangkan industri pariwisata sebagai solusinya. Dengan demikian, wisata yang diinisiasi oleh masyarakat dan karang taruna di Desa Nglanggeran telah berhasil menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut. Keberhasilan ini tercermin dalam prestasi wisata Desa Nglanggeran, yang berhasil meraih penghargaan dalam perlombaan wisata regional, nasional, dan internasional.

Konsep wisata *community-based tourism* dijalankan dengan sukses di Desa Nglanggeran. Konsep ini melibatkan kolaborasi antar kelompok masyarakat dan memberikan keuntungan ekonomi kepada mereka tanpa mengganggu pekerjaan utama dan privasi pribadi. Masyarakat diberikan kesempatan untuk mengembangkan dan memajukan wisata di Desa Nglanggeran. Beberapa destinasi alam dan budaya yang dikembangkan di Desa Nglanggeran termasuk Gunung Api Purba, Embung Nglanggeran, Air Terjun Kandang, Kampung Pitu, Tlogo Guyangan, Sumber Comberan, Karawitan, Gejog Lesung, Rasulan, Tingalan, *Videomaker*, Permainan Rakyat Tradisional, Agrowisata Embung, Ngekong dan Hidroponik.

Sementara itu, unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco juga mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dengan persentase mencapai 54 persen. Beberapa indikator efektivitas, seperti kesesuaian dan signifikansi tingkat pemberdayaan, termasuk dalam kategori tinggi. Namun, terdapat indikator lain, seperti kebermanfaatan, keberlanjutan, besaran dan luasan geografis, serta tingkat partisipasi, yang termasuk dalam kategori sedang atau rendah. BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco menghadapi beberapa kendala dalam pengembangan wisata. Namun, mereka telah menjalin kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Daerah Yogyakarta untuk memanfaatkan potensi wisata alam di kawasan hutan produksi. Meskipun hanya beberapa anggota dan kelompok masyarakat yang aktif dalam pengembangan wisata di Desa

Banyusoco, unit usaha ini terus berusaha meningkatkan kegiatan wisata dengan dukungan dan pelatihan dari Desa Banyusoco, Balai KPH Yogyakarta, dan komunitas wisata.

Di sisi lain, unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan juga mencapai tingkat efektivitas yang tinggi, dengan persentase mencapai 100 persen. Pembentukan, pengelolaan, dan pemanfaatan unit usaha ini telah sesuai dengan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa serta PP No. 11 Tahun 2021 Tentang Badan Usaha Milik Desa. Unit usaha ini dimulai dari potensi lahan pertanian yang dikembangkan dengan konsep eduwisata. Meskipun mengalami kendala selama dua tahun, setelah pergantian pengurus BUMDes, unit usaha ini berhasil dikembangkan dengan fokus pada pemberdayaan masyarakat sekitar.

Wisata Lembah Desa Pulutan menjadi fokus pengembangan dengan melibatkan petani padi dan pendirian kios pedagang untuk memberdayakan masyarakat. Pembangunan wisata ini menghabiskan anggaran sebesar 140 juta rupiah, yang sebagian besar berasal dari dana pihak ketiga. BUMDes Maju Mandiri Pulutan membuktikan keseriusan dan kesuksesan dalam membangun dan mengembangkan potensi wisata di Desa Pulutan. Wisata ini memberikan peningkatan perekonomian kepada masyarakat yang terdampak dan menjadi salah satu penyumbang terbesar pendapatan asli desa.

Penelitian yang dilakukan oleh [Ihsan & Setiyono \(2018\)](#) tentang pengelolaan BUMDes Gerbang Lentera dan penelitian [Zunaidah et al. \(2021\)](#) tentang peran BUMDes berbasis pertanian juga menghasilkan kesimpulan positif tentang efektivitas BUMDes dalam pengembangan desa wisata dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Faktor-faktor seperti sumber daya alam, sumber daya manusia, dukungan pemerintah, dan partisipasi masyarakat menjadi kunci keberhasilan BUMDes tersebut.

Dengan demikian, melalui pengelolaan unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes, desa-desa seperti Nglanggeran, Banyusoco, dan Pulutan telah berhasil meningkatkan efektivitas dan memberikan manfaat signifikan bagi anggota dan masyarakat yang terdampak. Pengembangan wisata yang dilakukan oleh BUMDes tersebut telah membawa perubahan positif dalam perekonomian, kreativitas, keahlian, status sosial, dan lingkungan di desa-desa tersebut. Dengan terus berupaya mengatasi kendala yang ada dengan melibatkan berbagai pihak, BUMDes memiliki potensi yang besar untuk terus mengembangkan potensi wisata dan memberikan peningkatan kesejahteraan bagi masyarakat.

Tabel 1. Besaran efektivitas unit usaha BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Efektivitas unit usaha BUMDes	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	n	Persentase	n	Persentase	n	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	16	45,71	0	0,00
Tinggi	35	100,00	19	54,29	35	100,00
Total	35	100	35	100	35	100

### **Tingkat Kesejahteraan Anggota dan Masyarakat Terdampak BUMDes**

Kesejahteraan menjadi salah satu bagian yang cukup penting guna melindungi serta membangun stabilitas sosial dan ekonomi, dimana stabilitas sosial dan ekonomi diperlukan guna meminimalisir akan terjadinya kecemburuan sosial. Hakikatnya, setiap individu memerlukan kesejahteraan baik secara materil maupun non-materil. Kesejahteraan haruslah selalu dijadikan sebagai asas utama bagi seluruh unit yang berada di dalam pemerintahan maupun perusahaan guna melaksanakan peranan sebagai bagian dalam memberikan pelayanan sosial. Kesejahteraan juga merupakan skema terstruktur dari setiap institusi dan pelayanan sosial guna mendukung setiap individu atau kelompok dalam memperoleh standar hidup serta kesehatan yang lebih baik (Ambadar, 2008; Friedlander, 1961; Tsabit, 2019). Melalui UU No. 11 Tahun 2009 diterangkan bahwasanya pengelolaan kesejahteraan sosial ialah sebuah usaha yang memiliki kejelasan arah serta tujuan, terintegrasi serta berkesinambungan dan dilaksanakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah serta masyarakat dalam pelayanan sosial guna melengkapi kebutuhan dasar dari setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial dan perlindungan sosial.

Tingkat kesejahteraan anggota serta masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai sebesar 100 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden sudah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah dapat memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya besaran persentase tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran juga disebabkan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan kawasan wisata di Desa Nglanggeran yang dapat menyerap angkatan kerja produktif di Desa Nglanggeran. Komunikasi dan koordinasi yang baik juga dilakukan oleh masyarakat, pengelola desa wisata, BUMDes Tunas Mandiri Nglanggeran dan aparatur Desa Nglanggeran guna terciptanya keadaan yang harmonis serta dapat meminimalisir konflik sosial yang terjadi antar masyarakat di Desa Nglanggeran.

Tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco tergolong ke dalam kategori sedang dengan besaran persentase mencapai sebesar 71 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas responden belum mencapai skoring yang ditetapkan dalam penelitian ini terkait dengan tingkat kesejahteraan. Berdasarkan hasil pengamatan langsung, memang mayoritas responden sudah merasa memiliki hidup yang sejahtera akan tetapi banyak dari responden yang belum dapat memenuhi kebutuhan hidup untuk sehari-hari. Hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco memang membawa angin segar kepada masyarakat. Hal ini dikarenakan, melalui unit usaha pengelolaan kawasan wisata tercipta lapangan pekerjaan baru di Desa Banyusoco guna mengurangi jumlah pengangguran dari angkatan kerja produktif di Desa Banyusoco. Sayangnya angin segar tersebut tidak dapat dioptimalkan semaksimal mungkin, dikarenakan kurangnya komunikasi dan koordinasi dari masyarakat, pengelola kawasan wisata, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dan aparatur Desa Banyusoco. Akibat dari kurangnya komunikasi dan koordinasi timbul rasa ketidakpercayaan terhadap unit usaha pengelolaan kawasan akibatnya terjadilah konflik sosial antara pemuda, masyarakat,

pengelola desa wisata, BUMDes Bangkit Ngurakabi Banyusoco dan aparaturnya Desa Banyusoco.

Sementara itu, tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat yang terdampak akan hadirnya unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan tergolong ke dalam kategori tinggi dengan besaran persentase mencapai 57 persen. Hal ini disebabkan oleh mayoritas dari responden telah merasa memiliki hidup yang sejahtera serta telah mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Tingginya besaran tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan juga disebabkan oleh terciptanya lapangan pekerjaan baru melalui pengelolaan kawasan wisata di Desa Pulutan guna menyerap tenaga kerja usia produktif di Desa Pulutan. Meskipun besaran tingkat kesejahteraan anggota dan masyarakat terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan tergolong ke dalam kategori tinggi, tetapi masih terdapat anggota ataupun masyarakat yang belum mencapai skoring tingkat kesejahteraan yang telah ditentukan. Hal ini disebabkan oleh sebagian masyarakat masih belum dapat mengoptimalkan peluang yang tercipta melalui unit usaha pengelolaan kawasan wisata. Selain itu juga, masih terdapatnya beberapa anggota dan masyarakat yang terdampak unit usaha pengelolaan kawasan wisata BUMDes Maju Mandiri Pulutan ke dalam tingkat kesejahteraan sedang dikarenakan kurang terciptanya komunikasi dan koordinasi antara masyarakat, pengelola kawasan wisata, BUMDes Maju Mandiri Pulutan dan aparaturnya Desa Pulutan sehingga keharmonisan dalam bermasyarakat belum optimal. Akibat dari kurang harmonisnya kehidupan bermasyarakat mengakibatkan masih terdapat konflik sosial di masyarakat. Konflik sosial tersebut disebabkan dari masih berkembangnya unit usaha ini sehingga belum mampu untuk benar-benar memberikan lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat Desa Pulutan lainnya.

Tabel 2. Jumlah dan persentase anggota dan masyarakat *terdampak hadirnya unit usaha* BUMDes Desa Nglanggeran, BUMDes Desa Banyusoco dan BUMDes Desa Pulutan

Tingkat Kesejahteraan	Desa Nglanggeran		Desa Banyusoco		Desa Pulutan	
	n	Persentase	n	Persentase	n	Persentase
Rendah	0	0,00	0	0,00	0	0,00
Sedang	0	0,00	25	71,43	15	42,86
Tinggi	35	100,00	10	28,57	20	57,14
Total	35	100	35	100	35	100

### **Hubungan dan Dampak Efektivitas BUMDes terhadap Kesejahteraan Masyarakat**

Berdasarkan hasil temuan dalam pengamatan langsung di lapang yang dimuat di dalam Tabel 3, dapat dinyatakan bahwa tidak terdapat responden yang memiliki tingkat kesejahteraan dalam kategori rendah. Persebasaran dari data penelitian menunjukkan responden dalam penelitian yang memiliki tingkat kesejahteraan tergolong dalam kategori sedang didominasi oleh responden yang menilai bahwa efektivitas dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata tergolong dalam kategori tinggi dengan jumlah 27 jiwa atau 26 persen.

Sementara itu, terdapat 13 jiwa atau 12 persen yang memiliki tingkat kesejahteraan tergolong dalam kategori sedang dengan penilaian terhadap efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata termasuk ke dalam kategori sedang. Dominasi responden dalam penelitian ini memiliki tingkat kesejahteraan yang tinggi dengan penilaian terhadap efektivitas unit usaha BUMDes termasuk ke dalam kategori tinggi dengan jumlah 64 jiwa atau 61 persen.

Penilaian tersebut didasari oleh pendapat dari responden yang menyatakan bahwa BUMDes telah berupaya semaksimal mungkin guna mengangkat tingkat kesejahteraan, memperbaiki keadaan perekonomian dan memperbaiki lingkungan masyarakat yang terdampak melalui unit usahanya. Responden yang memiliki tingkat kesejahteraan tinggi dan menilai efektivitas unit usaha BUMDes termasuk ke dalam kategori tinggi merupakan responden yang mampu untuk menangkap peluang serta memanfaatkan kesempatan yang diberikan dengan mengikuti berbagai tahapan dalam mengembangkan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata

Tabel 3. Tabel silang jumlah dan persentase efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan

		Kesejahteraan Masyarakat							
		Rendah		Sedang		Tinggi		Total	
		n	%	n	%	n	%	N	%
Efektivitas Unit Usaha BUMDes	Rendah	0	0	0	0	0	0	0	0
	Sedang	0	0	13	12	3	3	16	15
	Tinggi	0	0	27	26	62	59	89	85
	Total	0	0	40	38	65	62	105	100

Mendasar kepada hasil dari penelitian yang telah didapatkan, hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata berbanding lurus dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh anggota dan masyarakat terdampak unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata merasakan adanya peningkatan dari kualitas hidup setelah hadirnya unit usaha tersebut. Peningkatan kualitas hidup tersebut mendasar kepada 3 aspek yaitu sosial, ekonomi dan lingkungan. Peningkatan yang terjadi melalui aspek sosial dikarenakan mayoritas dari responden yang memiliki kegiatan positif serta mendapatkan pengalaman baru dalam bertemu, mengelola, serta memanfaatkan peluang melalui perkembangan industri pariwisata. Peningkatan yang terjadi melalui aspek ekonomi dikarenakan mayoritas responden telah mampu untuk meningkatkan penghasilan melalui keikutsertaan dalam pengelolaan unit usaha maupun memanfaatkan peluang yang hadir melalui perkembangan industri pariwisata. Peningkatan yang terjadi melalui aspek lingkungan dikarenakan unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata mengajarkan dan menuntut kepada seluruh masyarakat untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang tersedia di desa menjadi sebuah kawasan wisata yang menarik bagi wisatawan sehingga wisatawan memiliki beragam pilihan dalam menentukan tujuan wisatanya. Selain itu juga, unit usaha ini mampu untuk mengajarkan kepada anggota dan masyarakat terdampak untuk terus meningkatkan keahlian dan kemampuan dalam membaca peluang guna meningkatkan penghasilan.

Keberlanjutan (*sustainability*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan melalui nilai probabilitas dari variabel keberlanjutan (*sustainability*). Hal ini disebabkan apabila anggota dan masyarakat secara terus menerus didampingi maka masyarakat tidak akan mampu untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang telah dirancang sehingga anggota dan masyarakat tidak mampu untuk menunjukkan kreativitasnya hasil dari pelatihan-pelatihan yang telah dilaksanakan sebelumnya. Selain itu juga, apabila monitoring dan evaluasi sudah terjadwal maka anggota dan masyarakat akan bekerja atau menunjukkan kemampuan serta keahliannya sesuai dengan jadwal dari monitoring dan evaluasi yang dilaksanakan, sehingga tingkat kesejahteraan masyarakat yang telah ditetapkan sulit untuk tercapai.

Besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini terjadi dikarenakan apabila semakin besar dan luas akibat positif yang dihasilkan dari unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata maka akan semakin sulit tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Hal ini disebabkan oleh setiap masyarakat yang akan bersaing guna memperbaiki kehidupannya serta akumulasi standar dari kesejahteraan akan semakin tinggi, akan tetapi apabila besaran dan luasan akibat positif tidak terlalu besar maka akan mudah bagi masyarakat dalam mencapai tingkat kesejahteraannya.

Signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang telah dilaksanakan oleh [Setiawati \(2016\)](#) yang menghasilkan pernyataan bahwa salah satu strategi yang berhasil dalam memajukan kesejahteraan masyarakat di kawasan perbatasan adalah pemberdayaan. Pemberdayaan sendiri memiliki tujuan guna meningkatkan kemampuan serta kemandirian dari masyarakat di kawasan perbatasan dalam mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi. Melalui konsep pemberdayaan tersebut, masyarakat dipandang sebagai subjek dari pembangunan, bukan objek dari pembangunan. Hal tersebut menjadikan masyarakat mampu untuk menikmati dari hasil pembangunan yang dilaksanakan secara nyata. Sinergi yang dilaksanakan oleh pemerintah, masyarakat serta pihak swasta yang terkait dalam pemberdayaan masyarakat merupakan bagian terpenting guna memajukan kesejahteraan masyarakat yang berada di kawasan perbatasan. Melalui pandangan dari ilmu pertahanan, pemberdayaan dijadikan salah satu wujud bela negara yang dilaksanakan oleh masyarakat di kawasan perbatasan. Kondisi tersebut mampu untuk mendukung terwujudnya perbatasan sebagai serambi terdepan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki daya saing, berdaulat serta aman.

Selanjutnya, tingkat partisipasi (*participation*) berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat. Hal ini sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh [Wicaksono et al. \(2021\)](#) yang menghasilkan pernyataan bahwa semakin tinggi tingkat partisipasi dari masyarakat maka akan semakin banyak jumlah masyarakat yang mengalami perubahan, perubahan yang dimaksud tersebut dapat berupa perubahan pekerjaan dan perubahan pendapatan. Keterlibatan langsung dari masyarakat dalam program wisata mampu membuka akses dalam mendapatkan pekerjaan serta meningkatkan penghasilan guna memperbaiki tingkat kesejahteraan.

Tabel 4. Hasil uji regresi efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat

Variabel	Koefisien	Probabilitas
(Constant)	24.532	.000
Kebermanfaatan ( <i>effectivity</i> )	-.388	.185
Kesesuaian ( <i>relevance</i> )	.355	.299
Keberlanjutan ( <i>sustainability</i> )	-.586*	.089
Besaran dan luasan akibat geografis akibat positif ( <i>impact</i> )	-.713*	.006
Signifikansi pemberdayaan ( <i>empowerment</i> )	.676*	.075
Tingkat partisipasi ( <i>participation</i> )	.383*	.024

## 5. KESIMPULAN DAN SARAN

Terdapat hubungan yang positif serta signifikan antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Hubungan yang terjadi tergolong kedalam kategori sedang ( $r=0.519$ ), serta terdapat pula empat indikator yang memiliki pengaruh signifikan antara efektivitas unit usaha BUMDes pengelolaan kawasan wisata dengan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator tersebut ialah keberlanjutan (*sustainability*), besaran dan luasan geografis akibat positif (*impact*), signifikansi pemberdayaan (*empowerment*) serta tingkat partisipasi (*participation*) masing masing memiliki nilai signifikansi mencapai (0.089), (0.006), (0.075) dan (0.024) dengan koefisien mencapai (-0.586), (-0.713), (0.676) dan (0.383) pada taraf nyata sebesar 10 persen.

Peran pemerintah sangat diperlukan dalam penelitian ini karena berkaitan langsung dengan perkembangan dari tingkat kesejahteraan masyarakat. Pemerintah melalui dinas terkait harus secara berkala melakukan pengawasan dan evaluasi serta membuat kebijakan yang tepat agar segala kegiatan dari unit usaha tersebut berjalan sesuai dengan peraturan dan hukum yang berlaku. Pemerintah daerah harus melaksanakan Permendagri No. 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal guna memudahkannya tingkat kesejahteraan masyarakat tercapai. Melalui pelaksanaan permendagri tersebut juga secara langsung dapat meningkatkan IPM didaerah yang dimaksud.

Berikut adalah beberapa saran bagi peneliti selanjutnya:

1. Peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dan memperluas indikator untuk mengukur efektivitas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini akan membantu memahami lebih baik tentang hubungan antara BUMDes dengan tingkat kesejahteraan dan mungkin menemukan indikator lain yang berpengaruh signifikan.
2. Dilakukan studi komparatif antara BUMDes yang berfokus pada pengelolaan kawasan wisata dengan BUMDes di sektor lainnya. Hal ini dapat memberikan wawasan lebih luas tentang efektivitas BUMDes dalam berbagai sektor dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.

3. Penelitian selanjutnya dapat melakukan analisis lebih mendalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan BUMDes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Misalnya, identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi keberlanjutan, dampak positif, pemberdayaan, dan partisipasi masyarakat dalam BUMDes.

## 6. DAFTAR PUSTAKA

- Aliyani, N. & Mafruhah, A.Y. (2022). Strategi Percepatan Pembangunan Desa Berkembang: Upaya Menuju Desa Mandiri yang Berkelanjutan. *Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis*, 1(2). <https://doi.org/10.29313/jrieb.v1i2.514>
- Ambadar, J. (2008). *Corporate Social Responsibility dalam Praktik di Indonesia*. PT. Elex Media Komputindo.
- BPS. (2022). *Indeks Pembangunan Manusia*.
- BPS Kabupaten Gunungkidul. (2021). *Indikator Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Gunungkidul 2021* (A. M. Munir (ed.)). Badan Pusat Statistik Kabupaten Gunungkidul.
- Dale, R. (2004). *Evaluating Development Programmes and Projects*. Sage Publication, Ltd.
- Faedlulloh, D. (2018). BUMDes dan Kepemilikan Warga: Membangun Skema Organisasi Partisipatoris. *Journal of Governance*, 3(1), 1–17. <https://doi.org/10.31506/jog.v3i1.3035>
- Friedlander, W. (1961). *Pengantar Kesejahteraan Sosial*. Gema Insani Press.
- Gurvantry, D. et al. (2022). Analisis Collaborative Governance dalam Pembangunan Kawasan Desa Wisata (Studi pada Desa Wisata E kang di Kabupaten Bintan). *PUBLICNESS: Journal of Public Administration Studies*, 1(3). <https://doi.org/10.24036/publicness.v1i3.65>
- Hasimi, D. M. (2020). ANALISIS PROGRAM BANTUAN PANGAN NON TUNAI (BPNT) GUNA MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DALAM PERSPEKTIF EKONOMI ISLAM. *REVENUE: Jurnal Manajemen Bisnis Islam*, 1(01). <https://doi.org/10.24042/revenue.v1i01.5762>
- Hosmer, D. W., & Lemeshow, S. (2000). *Applied Logistic Regression* (Second Edi). John Wiley & Sons, Inc.
- Ihsan, A. N., & Setiyono, B. (2018). Analisis Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Lentera Sebagai Penggerak Desa Wisata Lerep. *Journal of Politic and Government Studies*, 7(04), 221–230.
- Jung, I. J. (2009). A Critical Perspective on the Integration of Service Delivery Systems in Child-Youth Policy. *Korean Journal of Social Welfare Studies*, 40, 297–322. <https://doi.org/10.16999>
- Khumayah, S. (2021). EFEKTIFITAS DANA DESA BAGI PEMBANGUNAN DESA DI KABUPATEN CIREBON. *JURNAL SYNTAX IMPERATIF : Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, 2(1). <https://doi.org/10.36418/syntax-imperatif.v2i1.70>
- Lee, J. S. (2010). A Study on the Strategy of Korean Post-NPM Reform. *Korean Society and Public Administration*, 21, 29–47.
- Maskudi, M. et al. (2022). Pendampingan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di Kabupaten Pemalang. *Jurnal Abdidias*, 3(3). <https://doi.org/10.31004/abdidias.v3i3.583>
- Mertayasa, I. W. et al. (2021). Pengaruh E-Filing, Sanksi, Kesadaran, Dan Sosialisasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Pada KPP Pratama Gianyar. *Jurnal Riset Akuntansi Warmadewa*, 2(1). <https://doi.org/10.22225/jraw.2.1.2928.29-34>

- Nasfi, N. (2020). PENGEMBANGAN EKONOMI PEDESAAN DALAM RANGKA MENGENTAS KEMISKINAN DI PEDESAAN. *Jurnal EL-RIYASAH*, 11(1). <https://doi.org/10.24014/jel.v11i1.8818>
- Ndakularak, E. et al. (2017). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan Masyarakat Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. *Jurnal Agribisnis*, 11(6), 183–201.
- Nugroho, D. A. (2015). Evaluasi Penerapan dan Dampak Program Badan Usaha Milik Desa ( BUMDES ) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Rumah Tangga Miskin ( RTM ) di Desa Babadan Kecamatan Karangrejo Kabupaten Tulungagung ( Periode Mei 2014 – April 2015 ). *JESP Jurnal Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 7(2), 79–84.
- Nurdin, N. (2023). Kesejahteraan Sosial dalam Persepektif Demokrasi dan Otoritarian: Analisis Perbandingan Inggris dan Singapura. *PARAPOLITIKA: Journal of Politics and Democracy Studies*, 4(2), 140–167.
- Paramita, L. et al. (2021). Pengaruh Badan Usaha Milik Desa Terhadap Pusat Perkembangan Ekonomi Desa, Desa Maju Indonesia Sejahtera BUMDes Tanjung Mayan (Danau Teleko). *JANAKA: JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT KEWIRAUSAHAAN INDONESIA*, 2(1).
- Pemkab Gunungkidul. (2022). *Kedudukan Gunung Kidul*.
- Peraturan Perundang-undangan. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, Dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Peraturan Menteri Dalam Negeri.
- Septiawati, R. (2021). Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Pengembangan Potensi Lokal Budidaya Black Soldier Fly (Maggot) di Desa Sukaratu Karawang. *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 3(2). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v3i2.339>
- Setiawati, P. (2016). Pemberdayaan Sebagai Strategi Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Di Kawasan Perbatasan. *Sisi Lain Realita*, 1(2), 13–22. [https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1\(2\).1380](https://doi.org/10.25299/sisilainrealita.2016.vol1(2).1380)
- Sofyan, A. Y. et al. (2022). Implementasi Good Governance Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Di Desa Sukalaksana Kecamatan Samarang Kabupaten Garut. *Sawala: Jurnal Administrasi Negara*, 10(2). <https://doi.org/10.30656/sawala.v10i2.5723>
- Subehi, F. et al. (2018). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Desa Ponggok, Kabupaten Klaten. *Umbara Indonesia Journal of Anthropology*, 3(1), 34–43. <https://doi.org/10.24198/umbara.v3i1.25670>
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. ALFABETA CV.
- Sukarnoto, T. (2020). Pengembangan Ekowisata Berbasis Ekonomi Peluang Bisnis di Era Revolusi Industri 4.0 Desa Patuanan Kecamatan Leuwimunding Kabupaten Majalengka. *Etos: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 2(2). <https://doi.org/10.47453/etos.v2i2.214>
- Supardi, E. L., & Budiwitjaksono, G. S. (2021). Strategi Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Upaya Meningkatkan Pendapatan Asli Desa Di Desa Bungurasih. *JEMMA (Journal of Economic, Management and Accounting)*, 4(2). <https://doi.org/10.35914/jemma.v4i2.733>
- Teja, M. (2015). Pembangunan untuk Kesejahteraan Masyarakat di Kawasan Pesisir. *Jurnal Aspirasi*, 6(6), 63–76.
- Tsabit, A. M. (2019). Peningkatan Kesejahteraan Ekonomi Masyarakat Melalui Zakat. *AMAL: Jurnal Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–17.

- Wicaksono, G. S. et al. (2021). Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Kesejahteraan Penduduk Desa Wisata Kreet. *Planning for Urban Region and Environment*, 10(April), 1–10.
- Windusancono, B. A. (2021). UPAYA PERCEPATAN PERTUMBUHAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI INDONESIA. *MIMBAR ADMINISTRASI FISIP UNTAG Semarang*, 18(2).  
<https://doi.org/10.56444/mia.v18i2.2528>
- Zulpikar, Z. (2020). Karakteristik Wilayah Sebagai Basis Pendelegasian Kewenangan Kecamatan; Studi Kasus Di Kabupaten Sumbawa. ... : *Kajian Praktis-Akademis Kinerja Dan Administrasi ....*
- Zunaidah, A. et al. (2021). Peran Usaha BUMDes Berbasis Pertanian dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat. *Manajemen Agribisnis: Jurnal Agribisnis*, 21, 47–57.